



## Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Justino Buffon<sup>1</sup>, Tutut Dewi Astuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

---

### Abstract

Received: 3 November 2023

Revised: 6 November 2023

Accepted: 16 November 2023

*The main objective of this study was to find out the inventory recording system at the Yogyakarta Employment and Transmigration Office. The population in this study are all systems in the DIY Department of Employment and Transmigration. The variable observed by the authors in this report is the DIY Inventory Accounting System for the Department of Employment and Transmigration. Based on the research, it was found that the government inventory accounting records used at the Yogyakarta Employment and Transmigration Office used the periodic method. The periodic recording system is a recording system that is only carried out when there is an addition to inventory and does not immediately update the inventory value when usage occurs. The amount of ending inventory is known by carrying out a physical count (stock taking) at the end of the period so that at the end of this period an adjusting entry is made to update the value of the inventory.*

**Keywords:** *employment, transmigration, accounting system*

(\*) Corresponding Author: [justinobyr30721@gmail.com](mailto:justinobyr30721@gmail.com), [tutut@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:tutut@mercubuana-yogya.ac.id)

**How to Cite:** Buffon, J., & Astuti, T. (2023). Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 447-453. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207319>.

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia atau ketenagakerjaan berperan penting dalam peningkatan tingkat lapangan kerja, promosi akses yang sama terhadap peluang bisnis, fasilitasi pemerataan pembangunan nasional, dan pengentasan kemiskinan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Kemajuan teknologi yang pesat membutuhkan tingkat efisiensi dan akurasi yang tinggi dalam produksi informasi di dalam lembaga dan organisasi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan organisasi atau lembaga untuk meningkatkan operasinya adalah melalui pengelolaan dan penambahan aktivitasnya, termasuk aktivitas pengolahan persediaan barang. Alat tulis kantor (ATK), juga dikenal sebagai alat dan perlengkapan administratif, berfungsi sebagai sistem pendukung penting bagi organisasi dan lembaga, memastikan kelancaran dan kelangsungan aktivitas operasional. Ada atau tidak adanya ATK dapat berdampak signifikan pada kualitas dan kemajuan inisiatif yang dirancang oleh suatu organisasi atau lembaga.

Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan operasional instansi pemerintah secara inheren terkait dengan inventarisasi aset. Di instansi pemerintah, persediaan dianggap sebagai aset yang sangat dinamis karena keterlibatan langsung mereka dalam aliran masuk dan keluar barang dalam kegiatan operasional. Instansi pemerintahan sering menggunakan banyak sistem, termasuk kepegawaian, akuntansi, korespondensi, dan fungsi terkait lainnya. Sistem informasi yang

menjadi perhatian bagi sebuah instansi salah satunya adalah sistem informasi akuntansi, seperti persediaan barang. Menurut Widjajanto (2001), sistem informasi akuntansi mencakup sekumpulan data yang komprehensif, termasuk alat, formulir, catatan, dan perlengkapan yang terorganisir, seperti alat komunikasi, komputer, staf eksekutif, dan laporan, yang saling berhubungan.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 atas perubahan PP No. 24 Tahun 2005, mengenai “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” menetapkan bahwasanya “SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, dimana hal tersebut berfungsi sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah”.

Sistem informasi persediaan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan barang serta ketersediaannya. Bagi suatu instansi ketersediaan barang-barang penunjang kegiatan operasional ialah hal yang signifikan terkait dengan kelangsungan dan kelancaran kegiatan operasional instansi. Pencatatan persediaan barang di instansi juga merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memberikan informasi seakurat mungkin karena hal tersebut berkaitan dengan anggaran daerah yang dipakai untuk menunjang kegiatan operasional dari instansi.

Untuk menangani hal tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem pencatatan persediaan barang yang terintegrasi dan transparan sehingga dapat memberikan rasa kepuasan dan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan hal tersebut.

Berdasar pada paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis laporan praktik kerja lapangan dengan judul “Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi”. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu “untuk mengetahui sistem pencatatan persediaan barang di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY”.

## **METODE**

### **Objek**

### **Sejarah Singkat**

Kerangka peraturan yang mengatur Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam PP No. 14 Tahun 1958, dimana dalam peraturan tersebut menetapkan “penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan pengangguran, dan pemberian kerja pada pengangguran di daerah”. Pada tahun 1927, ketika masa Hindia Belanda telah berdiri suatu badan administratif yang disebut “Halicbeidsbemidelling”, yang berarti “perantara kerja”. Di tahun 1942, ketika Belanda menyatakan kekalahannya kepada Jepang, kantor tersebut mengalami perubahan nama oleh otoritas Jepang, yang menggantinya dengan “Halicsutigyokuyusisyo”, yang menunjukkan “perantara kerja”. Selanjutnya, pada masa peralihan, Jepang mengalihkan kendali kantor tersebut ke sebuah lembaga yang dikenal dengan nama “Halicpeas Prarta Podjo”.

Setelah Indonesia merdeka, lembaga-lembaga tersebut mengalami perubahan nama menjadi “Djawatan Sosial Perburuhan”. Entitas ini bersifat antar-sosial dan berorientasi pada tenaga kerja, sebagaimana tertuang dalam UU No.

03/1950, tentang “pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan tugas-tugas Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang No.19/1950”. Pada 31 Oktober 1951, Dewan Pemerintahan (DP) memutuskan untuk mendirikan badan independen bernama “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta” untuk memisahkan urusan perburuhan dari urusan sosial. “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta” kemudian berganti nama pada 15 November 1960 menjadi “Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta” karena adanya Perda No.11 Tahun 1960. Setelah ditetapkannya SKP DIY No. 109 Tahun 1966 pada 20 Oktober 1966, “Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta” mengalami perubahan nama menjadi “Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta”. Menyusul pemberlakuan Perda No. 10 Tahun 1982 pada 2 Juni 1982, “Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta” mengalami pengubahan kembali menjadi “Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan perluasan dan penyederhanaan struktur organisasi.

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yang memperkenalkan otonomi daerah mengakibatkan rekonfigurasi kerangka organisasi “Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta”. Menurut Perda No. 5 Tahun 2001, yang mengatur “Pembentukan dan Organisasi dinas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penggabungan dari tiga lembaga atau departemen, yaitu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penggabungan ketiga lembaga atau departemen tersebut secara resmi selesai pada 23 Juli 2001. Pada bulan Januari 2002, ketiga lembaga atau departemen tersebut dikonsolidasikan menjadi satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Dengan demikian, terjadinya pertemuan tersebut instansi bernamakan “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta” secara konsisten dipergunakan hingga sekarang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perkembangan dan transformasi sepanjang keberadaannya. Salah satu faktor penyebab perubahan ini adalah implementasi UU No. 13 Tahun 2002 mengenai “Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sebagai akibat dari UU ini, istilah “provinsi” sebelum “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga dibentuklah “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **Populasi dan Sampel**

### **Populasi**

Hartono (2011) berpendapat bahwasanya populasi tertentu menunjukkan karakteristik yang terbatas, sementara yang lain menunjukkan karakteristik yang tidak terbatas. Studi ini mencakup seluruh populasi sistem di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

### **Sampel**

Sugiono (2016), berpendapat bahwasanya sampel mewakili sebagian dari karakteristik populasi. Sampel penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu “Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY”.

### **Variabel Yang Diamati**

Menurut Sugiono (2017), variabel mengacu pada entitas apa pun yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki guna mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan. Variabel-variabel yang diteliti oleh penulis dalam laporan ini yaitu “Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan objek PKL**

Sistem akuntansi persediaan barang yang telah dijalankan memiliki beberapa kelemahan, untuk itu penulis mengangkat pokok permasalahan ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi DIY khususnya dalam mengembangkan sistem-sistem akuntansi persediaan. Berikut ada beberapa kelemahan yang sering terjadi pada sistem akuntansi persediaan barang Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi DIY. Dari hasil kerja praktik lapangan dilakukan analisis berdasarkan sistem akuntansi persediaan secara umum dimana masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam menjalankan sistem akuntansi persediaan di antaranya :

1. Tidak adanya integrasi yang efektif antara anggota staf yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan pengguna dan pengguna itu sendiri dalam sistem operasional, sehingga mengakibatkan proses pengadaan yang lamban.
2. Proses penyimpanan data saat ini masih menggunakan prosedur manual, yang menimbulkan tantangan ketika akses langsung ke data dibutuhkan.
3. Sistem terus menunjukkan kelambatan dalam kemampuannya untuk menyebarkan informasi pengguna secara efisien ke komponen terkait.
4. Tidak tersedia laporan yang tersusun secara sistematis.

### **Data (Hasil pengamatan) Objek**

#### **Waktu Pelaksanaan**

Penulis melaksanakan penelitian pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal 13 Maret 2023 s/d 13 April 2023. Selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan Penulis ditempatkan pada divisi subbagian umum

### **Keunggulan Dan Kekurangan Sistem Akuntansi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transimigrasi DIY**

#### **Keunggulan Sistem Yang Berjalan**

1. Pengadaan barang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sub bagian.
2. Informasi yang diberikan dalam laporan penggunaan item jelas dan komprehensif.
3. Mempunyai pendekatan yang sistematis dan terorganisir untuk mengelola dan mengontrol inventaris barang secara efektif.

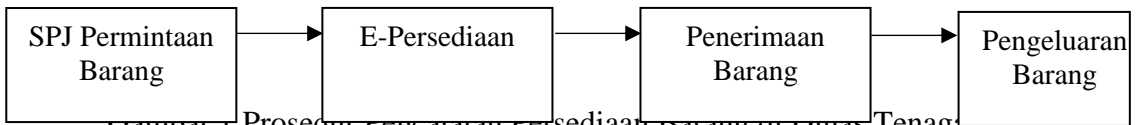
#### **Kekurangan Sistem Yang Berjalan**

1. Tidak adanya integrasi yang efektif antara anggota staf yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan pengguna dan pengguna itu sendiri dalam sistem operasional, sehingga mengakibatkan proses pengadaan yang lamban.

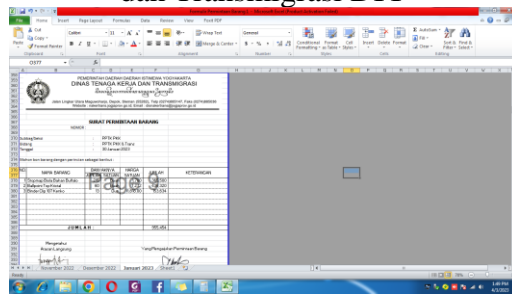
2. Proses penyimpanan data saat ini masih menggunakan prosedur manual, yang menimbulkan tantangan ketika akses langsung ke data dibutuhkan.
3. Sistem terus menunjukkan kelambatan dalam kemampuannya untuk menyebarkan informasi pengguna secara efisien ke komponen terkait.
4. Tidak tersedia laporan yang tersusun secara sistematis.

### Analisis Data

### Prosedur Pencatatan Persediaan Barang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

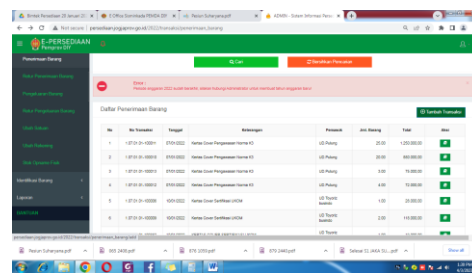


Gambar 1. Prosedur Pencatatan Persediaan Barang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY



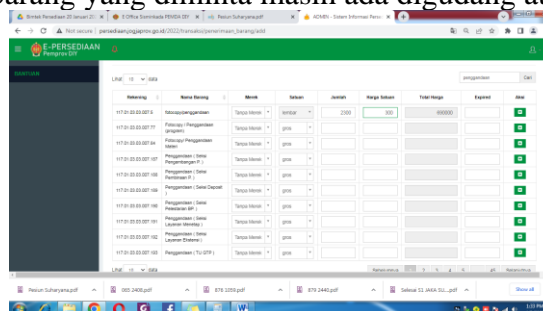
Gambar 2 SPJ Permintaan Barang

Pada gambar merupakan Surat Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan permintaan barang. Surat ini berisi mengenai jumlah dan jenis barang yang diminta dari setiap bidang.



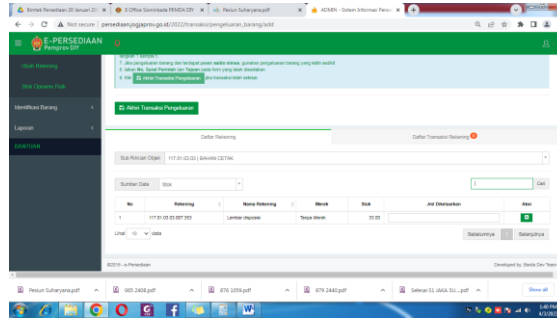
Gambar 3 Penginputan Permintaan Barang Ke Sistem

Pada gambar 3 merupakan penginputan SPJ permintaan barang kedalam sistem E-Persediaan yakni menggunakan akun pencarian penerimaan barang untuk mengecek apakah barang yang diminta masih ada digudang atau tidak.



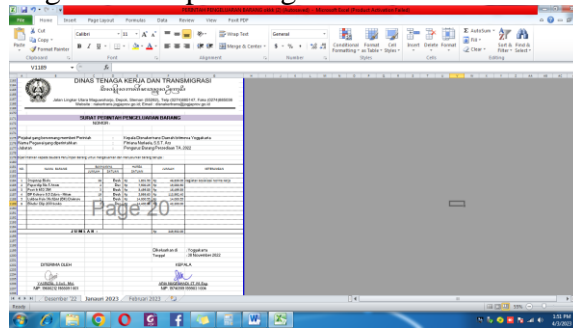
Gambar 4 Persediaan Barang

Pada gambar 4 merupakan jumlah persediaan barang yang tersisa di gudang. Apabila barang yang diminta telah habis maka admin akan mengajukan surat pembelian barang kepada bendahara barang untuk mengadakan barang yang telah habis.



Gambar 5 Pengeluaran Barang

Pada gambar Gambar 5 merupakan akun pengeluaran barang yang berfungsi untuk mencatat pengeluaran barang sesuai dengan jumlah permintaan berdasarkan SPJ permintaan barang dari setiap bidang.



Gambar 6 Surat Perintah Pengeluaran Barang

Pada gambar 6 merupakan surat perintah pengeluaran barang. Setelah ada permintaan barang maka barang yang sudah dipergunakan langsung dikeluarkan dari sistem pengeluaran barang. Barang yang dikeluarkan dari sistem dibuatkan surat pengeluaran barang sebagai pertanggungjawaban barang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan sistem pencatatan yang digunakan, maka kesimpulannya ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta menggunakan metode periodik untuk pencatatan akuntansi persediaan pemerintahannya. Sistem pencatatan periodik mengacu pada suatu metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara eksklusif pada saat terjadi penambahan persediaan, dan tidak secara langsung memberikan nilai persediaan pada saat penggunaan. Penentuan persediaan akhir melibatkan penghitungan fisik, juga dikenal sebagai *stock opname*, di akhir periode akuntansi. Selama akhir periode inilah penyesuaian jurnal diterapkan untuk mencerminkan nilai persediaan yang diperbarui.

## REFERENSI

- Adytria, W. (2018). *Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang, Harga Pokok, Produksi dan Transaksi Penjualan Berbasis Web*. *Jurnal PTIIK Malang*, Vol.2 No.6.
- Baridwan, Z. (1998). *Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode*. BPFE. Yogyakarta.
- Daerah, D. K. (2014). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kemendagri. Jakarta .
- Freddy, R. (2004). *Manajemen Persediaan Barang*. Raja Grafindon. Jakarta.
- Ladjamudin, B. (. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta.
- Muzawi R, Y. (2018). *Sistem Informasi Analisa dan Pengembangan Persediaan Barang pada Mini Market*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* , Vol.12 No.2. Riau.
- Pengertian persediaan.* (2008). Retrieved from [nin9r0emz.files..wordpress.com/2008/102/proposal-rpl.doc](http://nin9r0emz.files.wordpress.com/2008/102/proposal-rpl.doc)
- Pernyataan Standar Akuntansi Persediaan.* (2019). Retrieved from Standar Akuntansi Pemerintah: <https://bppkad.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PSAP-05-AKUNTANSI-PERSEDIAAN.pdf>
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. ANDI. Yogyakarta .
- Widjajanto, N. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga. Jakarta.